

Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto

Sarmila^{1*}, Romansyah Sahabuddin², Muh. Ichwan Musa³, Fadel Muhammad⁴, A. Mulia Saleh⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mekanis kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan seperti halnya dengan pengelolaan aset daerah. Tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerja sama dari seluruh pegawai, maka target yang ditetapkan tidak akan tercapai dengan optimal. Pengelolaan Aset Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto belum seutuhnya sesuaidengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kata kunci: Sistem Pengelolaan; Keuangan; Asset Daerah

Copyright (c) 2023 **Sarmila**

✉ Corresponding author :

Email Address : arthurlegend47@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, pengembangan dan membangun daerah masing masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki (Tambun dkk, 2021). Untuk Merealisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Telah Menetapkan Undang-Undang No.22 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang No.25 Tahun 2013 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah. Undang-Undang di perbaharui menjadi Undang Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Dalam pengelolaan asset (Nasution & Si, 2021). Pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, (Karim dkk, 2022) penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar asset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang

bersangkutan (Abduh dkk, 2023). Asset secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan) (Faizah, 2022). Istilah property seringkali melekat dengan istilah untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu *real estate is the physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure. Real estate* bersifat tidak bergerak (*immobile*) dan berwujud (*tangible*) (Musa dkk, 2019). Pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti perpohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang di bangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya (Kurniawan, 2012).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah, bahwasanya Pengelolaan Barang Milik daerah meliputi (Fajrin dkk, 2022); perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi (Winarto & Falah, 2020). Kondisi dimana belum terinventarisnya Barang Milik Daerah dengan baik sesuai peraturan yang berlaku pada kementerian / lembaga Negara menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban Barang Milik Daerah (Karim dkk, 2021). Arahnya dari langkah-langkah penertiban Barang Milik Daerah (inventarisasi dan penilaian) tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset daerah disetiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan (Sahabuddin, 2018). Aset daerah mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat (Dewi dkk, 2022).

Table 1. Daftar Aset Daerah di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto

NO	NAMA ASSET DAERAH	KETERANGAN
1	TANAH	
2	Peralatan dan mesin	Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Kantor Dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, Alat Keamanan
3	Gedung dan bangunan	
3	Jalan, irigasi dan jaringan	Jaringan
4	Asset tetap lainnya	Buku Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan, Aset Tetap Renovasi

Sumber: Kantor DPPKAD Kabupaten Jeneponto Tahun 2022

Dari tabel diatas membuktikan begitu banyak aset daerah yang dimiliki oleh Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten jeneponto,

Yaitu mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya (Rahman dkk, 2022). Ini semua harus dikelola dengan baik agar menjadi nilai tambah dan bermanfaat untuk kemajuan Kantor tersebut.

METHODOLOGI

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dari responden penelitian dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti (Sugiyono, 2019). Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

Tabel 1. Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian

SUB POPULASI	POPULASI	SAMPEL
Pegawai DPPKAD	33	33
Key Informan atau Informasi Kunci	4	4
JUMLAH	37	37

Dalam menganalisis, peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. Kemudian data dituangkan kedalam bentuk Tabel-tabel dengan angka dan presentase untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif analisa (Romansyah dkk, 2022). Dalam menganalisa data penelitian penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif atau disebut juga analisis isi (*Content analysis*). Analisa deskriptif ini diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, setelah data terkumpul dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data dengan mengklasifikasinya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Adapun persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{x}{N} \times 100\% \text{ Dimana:}$$

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Responden

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini Key Informan adalah dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yakni diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Key Informan dijadikan sampel adalah 4 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Sekretaris, Kepala bidang aset, dan Kepala

Seksi. Untuk lebih jelasnya, penetapan jumlah populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian

NO	SUBPOPULASI	POPULASI	SAMPLE
		I	L
1	Pegawai DPPKAD	33	33
2	Key Informan atau Informasi Kunci	4	4
JUMLAH		37	37

Sumber: Data hasil penelitian, 2022.

Tabel 3. Distribusi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki laki	21	63,63%
Perempuan	12	36,36%
Jumlah	33	100%

Sumber: Data hasil penelitian, 2022.

Tabel 4. Distribusi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Frekuensi	Persentase
Sma	13	39,39%
D3	7	21,21%
S1	8	24,24%
S2	5	15,15%
Jumlah	33	100%

Sumber: Data hasil penelitian, 2022.

Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Kepala dinas	1	100%
2	Sekretaris	1	100%
3	Bidan asset	1	100%
4	Kepala seksi	1	100%

Jumlah	4	100%
---------------	----------	-------------

Sumber: Data hasil penelitian, 2022.

Dari tabel 5 diatas terlihat bahwasanya dalam proses wawancara yang dilakukan penulis mengambil 4 orang setiap jabatan fungsional yang berada dikantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto. Dimana 4 orang tersebut tersebar dan diambil satu di setiap jabatan fungsional yaitu terdiri dari: Kepala Dinas (1), sekretaris (1), Bidang Aset (1), Kepala Seksi (1). Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai jumlah aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten jeneponto maka berikut ini penulis menguraikan jumlah asset (Barang Milik Daerah), lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Daftar Jumlah Aset (Barang Milik Daerah)

No	Nama	Tahun 2022	
		JUMLAH BARANG (UNIT)	HARGA/NILAI(RP)
1	Tanah	1	-
	Peralatan dan mesin		
	A. Alat alat angkutan darat bermotor	24	991,139,153
	B. Alat alat kantor dan rumah tangga	270	1,238,157,332
	C. Alat alat studio dan komunikasi	6	538,587,000
2	D. Alat alat keamanan	8	920,000
3	Gedung dan bangunan		
	Jalan, irigasi, dan jaringan		
4	A. Instalasi listrik	1	98,560,000
	Aset tetap lainnya		
	A. Buku perpustakaan	2	2,200,000
	B. Barang bercorak kesenian/kebudayaan	5	197,690,000
5	C. Asset tetap renovasi	5	439,757,184
Jumlah		321	3,022,256,369

Sumber: Data hasil penelitian, 2022.

2. Pembahasan

Jumlah aset daerah pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jeneponto terbagi atas 4 jenis aset daerah pada tahun 2018 yaitu Tanah jumlah barang (unit) 1, harga tidak diketahui. Peralatan dan Mesin yang terdiri dari alat-alat angkutan darat bermotor dengan jumlah barang sebanyak 24 unit, harga nilai (Rp) 991.139,153. Alat-alat Kantor dan rumah tangga, dengan jumlah barangsebanyak 270 unit, harga nila (Rp) 1.238,157,332. Alat-alat studio dan komunikasi dengan jumlah barang sebanyak 6 unit, harga nilat (Rp) 538.587,000. Alat-alat keamanan dengan jumlah barang sebanyak 8 unit harga nila (Rp) 920.000. Jalan,

Irigasi dan Jaringan yaitu terdiri dari Instalasi listrik dengan jumlah barang sebanyak 1 unit, harga nilai (Rp) 98.560,000. Aset Tetap Lainnya yaitu adanya buku perpustakaan dengan jumlah barang sebanyak 2 unit, harga nilai (Rp) 2.200,000. Barang bercorak kesenian/kebudayaan dengan jumlah barang sebanyak 5 unit, harga nilai (Rp) 197.670,000. Aset tetap renovasi dengan jumlah barang sebanyak 5 unit, harga nilai (Rp) 439.757,184. Adanya jumlah aset daerah yang tidak tercantum biaya, dikarenakan asset tersebut diatas masih milik Kabupaten Takalar dan belum diserahkan ke Kabupaten Jeneponto sehingga sulit untuk mengetahui nilai biaya aset tersebut.

Sistem pengelolaan aset daerah ini perlu diciptakan dengan baik agar para pengambil kebijakan lebih mudah dan tepat dengan menggunakan berbagai formulir (Hasniati dkk, 2023). baik yang telah ada dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2011 maupun pengelolaan yang disajikan dalam bentuk statistik dengan membuat standar yang mudah dipahami oleh stekholder, karena bentuk statistik pengelolaan aset/barang milik daerah yang mempunyai standar yang ditetapkan dengan peraturan.

Tabel 7. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah

No	Jenis barang	Jumlah	Dokumen kepemilikan	Penggunaan	Harga dalam (rupiah)
1	Tanah	1	Tidak lengkap	Kantor DPPKAD	-

Sumber: Data hasil penelitian, 2022.

Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah yang di buat oleh Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jeneponto Agustus 2018 terlihat pada tabel diatas ini inventaris tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jeneponto tertera jenis barang berupa 1 tanah, dengan dokumen kepemilikan tidak lengkap, penggunaan kantor DPPKAD dan harga dalam rupiah tidak tercantum (Karim dkk, 2022). Dari hasil wawancara penulis bersama Kepala Bidang Aset yaitu beliau mengatakan bahwa Kartu Inventaris Barang yang berupa tanah dengan dokumen kepemilikan tidak lengkap (Mardjuni dkk, 2022), penggunaan Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD). Harga dalam rupiah tidak tercantum dikarenakan status kepemilikan aset tanah tersebut masih berada pada Pemerintah Kabupaten Takalar di sebabkan belum ada serah terima aset sampai saat ini, oleh sebab itu perlu adanya komunikasi lanjut pemerintah daerah pemekaran dengan kabupaten induk yaitu tentang pemindahan aset daerah yang berupa tanah tersebut diatas.

Tabel 8. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan Dan Mesin

No	Jenis/nama barang	jumlah	Dokumen kepemilikan	penggunaan	Harga dalam rupiah
1	Speda motor trail Kawasaki	10	Tidak lengkap	Pegawai	281.500.000

2	Mobil double cabin	1	Tidak lengkap	-	333.592.300
3	Mobil dinas nissam	1	Tidak lengkap	Kepala dinas	180.715.853
4	Speda motor dinas	4	Tidak lengkap	Pegawai eselon	63.491.000
5	Lapto apple	2	Lengkap	-	28.798.000
6	Camera/ handikem	2	Lengkap	-	14.875.000
7	Infokus	2	Lengkap		12.595.000

Sumber: Data hasil penelitian, 2022.

Data laporan pengelolaan aset tetap (barang milik Daerah) pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah periode Agustus 2018 yaitu berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin dimana dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B peralatandan mesin yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah tampak jelas peralatan dan mesin sebanyak 22 barang yang terdiri dari, sepeda motor trail Kawasaki berjumlah 10 unit, dokumen kepemilikan tidak lengkap, pengunanya pegawai, harga (dalam rupiah) 281,500,000. Mobil doublecabin berjumlah 1 unit, dokumen kepemilikan tidak lengkap, penggunaan kepaladinas, dan harga dalam rupiah 333,592,300. Mobil Dinas Nissan berjumlah 1 unit, Dokumen Kepemilikan Tidak lengkap, penggunaan pejabat eselon 2 (Kepala Dinas), dan harga dalam rupiah yang dimasukkan harga beli sebesar 180,715,853. Sepeda motor Dinas berjumlah 4 unit, dokumen kepemilikan tidak lengkap, penggunaan Pejabat Eselon, harga dalam rupiah 63,491,000. Laptop Apple jumlah barang 2 unit (Karim dkk, 2022). Dokumen Kepemilikan lengkap, penggunaan tidak diketahui, harga dalam rupiah 28,798,000. Camera/handikem 2 unit, Dokumen Kepemilikan lengkap, penggunaan tidak diketahui, harga dalam rupiah 14,875.000. Infokus 2 unit, Dokumen Kepemilikan lengkap, penggunaan tidak diketahui, harga dalam rupiah 12,595,000. Seharusnya harga dalam rupiah dicantumkan adalah harga perolehan (Ismail dkk, 2022). Harga perolehan yaitu harga yang dipeoleh untuk memperoleh suatu asset tersebut (Putera dkk, 2021). Berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2018 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Tabel 9. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, irigasi dan Jaringan

No	Jenis/nama barang	Jumlah	Dokumen kepemilikan	Penggunaan	Harga dalam rupiah
1	Instalasi listrik	1	TIDAK LENGKAP	Kantor DPPKAD	95.560.000

Sumber: Data hasil penelitian, 2022.

Kartu inventaris barang (KIB) D jalan, irigasi dan jaringan. Penulis mendapatkan laporan pengelolaan aset daerah (barang milik daerah) pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto pada Agustus 2018 (Kurniawan dkk, 2020). Dimana tabel diatas berisikan satu jenis nama barang instalansi listrik, jumlah 1, dokumen kepemilikan tidak lengkap, penggunaan kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), harga dalam rupiah 98,560,000. Untuk KIB D terlihat bahwasanya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan satu diantara tiga aset daerah tersebut pada KIB D yaitu Jaringan, sementara irigasi dan jalan tidak tersentuh.

Tabel 10. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya

No	Jenis/nama barang	Jumlah	Dokumen kepemilikan	Penggunaan	HARGA (DALAM RUPIAH)
1	Buku peraturan perundangan	1	Tidak lengkap	Semua ruangan	400.000
2	Buku lainnya	1	Tidak lengkap	-	1.800.000
3	Pembuatan kedudukan baleho	5	Tidak lengkap	WILAYAH JENEPONTO	197.670.000
4	Pembuatang parving blok	1	Tidak lengkap	-	36.850.000
5	Pembuatan paker	1	Tidak lengkap	Kantor DPPKAD	45.100.714
6	Pemasangan keramik	1	Tidak lengkap	-	50.314.000
7	Rehap gedung kantor	1	Tidak lengkap	Kantor DPPKAD	193.651.000
8	Rehap sedang gedung arsip	1	Tidak lengkap	Sekretari	113.841.470

Sumber: Data hasil penelitian, 2022.

Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten jeneponto pada Agustus 2018. Dimana tabel diatas terdiri delapan jenis barang yang ada di Kartu Inventaris Barang (KIB) C seperti buku peraturan perundangan, jumlah 1, dokumen kepemilikan tidak lengkap, penggunaan semua ruangan, harga (dalam rupiah) 400,000. Buku lainnya, jumlah barang 1, dokumen kepemilikan tidak lengkap, penggunaan tidak diketahui, harga (dalam rupiah) 1.800,000. Pembuatan kedudukan

baleho, jumlah barang 5, dokumen kepemilikan lengkap, penggunaan Wilayah Jeneponto, harga (dalam rupiah) 197,670,000. Pembuatan parving Blok, jumlah barang 1, dokumen kepemilikan tidak lengkap, penggunaan tidak diketahui, harga (dalam rupiah) 36,850,000. Pembuatan parkir, jumlah barang 1, dokumen kepemilikan tidak lengkap, penggunaan Kantor DPPKAD, harga (dalam rupiah) 45,100,714.

Pemasangan keramik, jumlah 1, dokumen kepemilikan tidak lengkap, penggunaan tidak diketahui, harga (dalam rupiah) 50,314,000. Rehap gedung Kantor, jumlah 1, dokumen kepemilikan Tidak Lengkap, penggunaan Kantor DPPKAD, harga (dalam rupiah) 193,651,000. Rehap sedang gedung arsip, jumlah 1, dokumen kepemilikan tidak lengkap, penggunaan Sekretariat, harga (dalam rupiah) 113,841,470. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya masih ditemukan beberapa data yang terdapat diatas tidak diketahui seperti dokumen kepemilikan yang tidak lengkap, penggunaan yang tidak diketahui dalam pengelolaan aset tetap (barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten jeneponto Berdasarkan informasi wawancara Kepala Kepala Seksi Inventaris mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan kartu inventaris barang dikarenakan lambannya laporan dari setiap bidang kerja di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jeneponto (Romansyah, 2016). Dimana setiap bidang kerja memiliki pekerjaan yang sangat banyak sehingga tidak terkomodirnya data-data yang diperlukan dalam pengisian kartu inventaris barang tersebut diatas seperti, tidak melampirkan dokumen kepemilikan, serta keadaan barang sehingga sulit untuk mengetahui bagaimana keadaan barang tersebut. Untuk itu kepala Kantor agar dapat mengevaluasi kepala bidang yang ditunjuk untuk memasukkan dokumen kepemilikan tersebut diatas ke kartu inventaris barang.

SIMPULAN

Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten jeneponto. Adapun hasil penelitian terhadap Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten jeneponto dapat diambil kesimpulan. Dalam menganalisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten jeneponto belum berjalan dengan baik dan belum akurat mulai dalam pendataan jumlah aset daerah yang dimiliki serta sistem dan prosedur dalam pengelolaan aset daerah tidak berjalan sebagai manamestinya. Dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten jeneponto belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten jeneponto, berupa implementasi perencanaan pengelolaan aset daerah, tentang bagian kebutuhan, pengadaan, biaya, pengguna, pengurus terdapat beberapa aset daerah implementasi perencanaan yang tidak berjalan. Implementasi penatausahaan, tentang bagian pembukuan dan inventaris ada beberapa pengelolaan aset yang tidak berjalan. Implementasi pemanfaatan tentang sewa, pinjam pakai, kerjasama, bangun gunaserah dan bangun serah guna dikatakan semua tidak berjalan. Implementasi pemeliharaan juga tidak berjalan. Dari semua keterangan tersebut diatas dikarenakan banyaknya hambatan hambatan yang dihadapi mulai dari kurangnya pemahaman

tentang pengelolaan asset daerah yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kurangnya kesadaran aparat pemerintah, kurang transparannya pengelolaan aset tersebut, kurangnya kontrol dan kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto. Dari hasil analisa angket dapat diketahui bahwa Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto adalah kurang baik dengan jumlah persentase 54,6 %. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian pada bab sebelumnya bahwa hasil 41 – 55 % artinya kurang baik, dengan penilaian kurang baik ini masih banyak terdapat kekurangan mengenai Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah.

Referensi

- Abduh, T., Remmang, H., Palisuri, P., & Karim, A. (2023). Leadership Model and Work Motivation of Employees Research and Development Planning Agency for Regional South Sulawesi Province. *target*, 95(146.22), 154. DOI: 10.47191/jefms/v6-i1-23
- Dewi, R., Azis, M., Rauf, A., Sahabuddin, R., & Karim, A. (2022). Empowering Communities on the Feasibility of Local Chicken Livestock Business in South Sulawesi Province, Indonesia. *Specialusis Ugdyms*, 1(43), 11034-11045.
- Faizah, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763-776. DOI: [10.36778/jesya.v5i1.539](https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539)
- Fajrin, M., Sahabuddin, R., & Ruma, Z. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 183-191.
- Hasniati, H., Indriasari, D. P., Sirajuddin, A., & Karim, A. (2023). The Decision of Women in Makassar City to Entrepreneur. *Binus Business Review*, 14(1).
- Ismail, M., Sahabuddin, R., Idrus, M. I., & Karim, A. (2022). Faktor Mempengaruhi Keputusan Pembelian pada Online Marketplace pada Mahasiswa Universitas Hasanuddin. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 49-59. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1831>
- Karim, A. A. K., Jumarding, A., & Ahmad, A. (2022). The Role of Zakat in National Economic Transformation through Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *International Journal of Commerce and Finance*, 8(2), 75-98.
- Karim, A., Desi, N., & Ahmad, A. (2022). Regional Public Water Company Business Plan for Sustainable Economic in Makassar City, Indonesia. *Specialusis Ugdyms*, 1(43), 10864-10876.
- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds. *The Winners*, 22(1), 89-95. <https://doi.org/10.21512/tw.v22i1.7013>
- Karim, A., Syamsuddin, I., Jumarding, A., & Amrullah, A. (2022). The Effect of Gender Independence and Leadership Style on Audit Quality in Makassar Public Accounting Offices. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(7), 114-126. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.341>
- Kurniawan, A. W. (2012). Pengaruh kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan Bank

- Sulselbar. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 16(4), 391-408. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i4.119>
- Kurniawan, A. W., Musa, M. I., Dipotatmodjo, T. S., & Nurman, N. (2020). Determinants of University Student's Work Readiness. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* ISSN, 2277-3878.
- Mardjuni, S., Thanwain, I. N., Abubakar, H., Menne, F., & Karim, A. (2022). BUSINESS SUSTAINABILITY IN FOOD AND BEVERAGE PROCESSING INDUSTRY THROUGH INNOVATION IN MAROS REGENCY, INDONESIA. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(6). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.85>
- Musa, M. I., Haeruddin, M. I. M., Haeruddin, M. I. W., & Burhan, M. I. (2019). Analysis of Segmentation, Targeting, and Positioning in Hospitality Sector: The Case of Paputo Beach Cafe. *African Journal of Hospitality, Tourism, and Leisure*, 8(4).
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Putera, W., Sahabuddin, R., Rakib, M., & Lestari, I. (2021). The Influence of Facilities and Innovation in Improving Consumer Satisfaction through Creativity in MSMEs Micro Handicraft Products in South Sulawesi Province. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5.
- Rahman, F. A., Anwar, A., Sahabuddin, R., & Ruma, Z. (2022). Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan PT. Telkom Witel Makassar. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 39-46.
- Romansyah Sahabuddin, M. I., Idrus, M. I., & Hamsyah, A. K. (2022). Pottery Marketing Competitive Strategy in Pattalassang Sub-district Takalar Regency, Indonesia. *Specialusis Ugdyamas*, 1(43), 11075-11088.
- Romansyah Sahabuddin, R. S. (2016). Development of business values and behaviours: Takalar district, South Sulawesi (Indonesia) case study. *Actual Problems of Economics*, 2(176), 440-449.
- Sahabuddin, R. (2018). Effect of entrepreneurship commitment to self-efficacy through intention of entrepreneurship and competence. *International Journal of Business and Management Science*, 8(1), 67-81.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Jakarta Alfabeta.
- Tambun, E. R., Koleangan, R. A., & Rumat, V. A. (2021). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4), 1-14. <https://doi.org/10.35794/jpekd.32760.19.4.2018>
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 150-161. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>